

HUBUNGAN KONSEP EKONOMI DAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ROSMINI MADEAMIN *)

Abstract : Education have the important role in make-up of human resource quality. Education influence fully economic growth a nation. This matter not only because education will have an effect on to productivity, but also will have an effect on to fertilitas society. Education make the human resource more able to quick parts and ready to in face of change in environment work. Therefore, is not surprise if state own the resident with the high education storey;level will have the fast economics growth storey;level

Keyword: Economic, Education, Education Defrayal, Human Resource

PENDAHULUAN

Dalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi (*Human Investment*). Pidato Theodore, W. Schultz pada tahun 1960 yang berjudul *Investment in Human Capital* di hadapan para ahli ekonomi dan pejabat yang tergabung dalam American Economic Association merupakan peletak dasar teori human capital. Pesan utama dari pidato tersebut sangat sederhana, yaitu proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan suatu investasi. Pada tahun 1966, Bowman memperkenalkan suatu konsepsi Revolusi Investasi Manusia di dalam Pemikiran Ekonomi yang diikuti oleh Denison dan Becker (1968) dalam pengujian terhadap teori *human capital* tersebut. Teori *human capital* telah mampu mempengaruhi para ilmuwan dan mengambil keputusan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembinaan sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan permintaan pendidikan di negara-negara berkembang pada masa pasca penjajahan (Bank Dunia. 1993).

Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan suatu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerata-

an dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. Nilai ekonomi pendidikan dapat dilihat dan sumbangan atas manfaat terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat, pendidikan bermanfaat untuk memperkaya kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Karena manfaatnya yang begitu luas dan dapat meresap ke berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan seyogianya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Mengacu kepada konsep di atas, masalah pembiayaan menjadi amat strategis untuk dikaji, bagaimana hubungannya dengan permasalahan pendidikan.

Tentang investasi SDM yang sebenarnya telah dipikirkan sejak zamannya Adam Smith dan para teoretisi lainnya sejak abad ke-15. Bank Dunia dengan program internasionalnya telah mengukuhkan kepercayaan terhadap peranan investasi sumber daya manusia bagi pertumbuhan ekonomi (*World Development Report, 1980*) kepercayaan ini didasarkan atas studi yang dilakukan pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, di antaranya Hicks (1980) dan Wheeler (1980) yang telah

dapat membuktikan kembali pentingnya pendidikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ini semakin kuat setelah memperhitungkan efek pendidikan dan bentuk investasi fisik lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi. (Psacharopoulos, 1984)

Investasi pendidikan per sekolah telah tumbuh cepat di Negara-negara berkembang (termasuk Indonesia). Investasi pendidikan ini dianggap telah menjelaskan faktor residu yang menerangkan peningkatan pendidikan, baik bagi perorangan maupun bagi masyarakat. Tampaknya, tidak sulit melakukan pengukuran terhadap biaya pendidikan yang secara konvensional terdiri dari biaya pelayanan guru, pengelola dan tenaga administratif, biaya sarana dan fasilitas belajar, dan biaya operasional lainnya. Namun, yang sulit diukur ialah apa yang disebut *income forgone* atau biaya kesempatan yang hilang atau dikembalikan oleh siswa selama mengikuti pendidikan. Biaya kesempatan ini relatif besar dan harus diperhitungkan di dalam mengukur biaya pendidikan formal, baik kesempatan yang dikembangkan oleh pemerintah maupun oleh individu setiap siswa itu sendiri.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka masalah pokok dalam artikel ini yaitu: Bagaimana konsep ekonomi dan pendidikan saling berhubungan satu sama lain?

Sedangkan tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Membahas mengenai konsep biaya dalam pendidikan
2. Membahas konsep dasar ekonomi dan Pendidikan
3. Membahas konsep pengembangan sumber daya manusia
4. Membahas dasar ekonomi Pendidikan

Dengan artikel ini diharapkan dapat menambah wawasan, khususnya bagi para pembuat kebijakan dalam upaya perbaikan mutu pendidikan di Indonesia.

KONSEP BIAYA DALAM PENDIDIKAN

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji dosen, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orangtua, maupun mahasiswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Cohn, 1988).

Biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh mahasiswa, atau orangtua/keluarga dan biaya kesempatan pendidikan dalam penelitian ini tidak termasuk dalam pengertian biaya pendidikan yang sifatnya nonbudgetair. Pengertian pembiayaan pendidikan yang bersifat budgetair, yaitu biaya pendidikan yang diperoleh dan akan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga. Artinya, biaya pendidikan yang bersifat budgetair dan nonbudgetair termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti yang luas.

Secara umum, konsep biaya itu mulai berlaku dalam produksi barang dan jasa, dimana biaya erat kaitannya dengan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh produsen, penjual, pembeli atau konsumen dalam bentuk uang atau moneter. Beberapa ahli ekonomi, membedakan biaya yang sebenarnya dengan pengeluaran. Sallis (1993) menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara biaya yang sebenarnya yang berhubungan dengan usaha atau pengorbanan yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang terdiri dari pengeluaran untuk membayar para pemilik faktor produksi.

Biaya dalam pengertian uang bagi seorang konsumen dianggap mewakili atau semua dengan biaya yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh seorang produsen. Namun demikian, karena ada rantai tran-

saksi ekonomi yang dimulai oleh pemilik atau produsen dan berakhir di konsumen terakhir, maka bagi transaksi di bagian atas sama atau lebih rendah bagi biaya transaksi bagi bagian bawah. Sebagai contoh, biaya produksi makanan bagi konsumen terakhir harga ecerannya lebih tinggi dari pada harga grosir, karena ada tambahan ongkos pembelian. Demikian pula harga grosir lebih tinggi daripada harga yang ditentukan oleh produsen.

Secara teoritis, konsep biaya di bidang lain mempunyai kesamaan dengan bidang pendidikan, dimana lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan. Kegiatan pendidikan sebenarnya dapat dipandang sebagai pelayanan (*services*) terhadap mahasiswa atau peserta didik selama belajar. Pendidikan sebagai proses produksi yang menghasilkan lulusan yang berhasil dapat ditentukan oleh jumlah pendaftar dan komponen-komponen input dalam suatu sistem pendidikan. Namun demikian, pada skala ekonomi mikro dan tingkatan keluarga atau suatu lembaga pendidikan, tidak terdapat hubungan yang fungsional antara biaya bagi produsen (lembaga) dengan biaya bagi konsumen (keluarga). Persoalannya, lembaga pendidikan pada umumnya tidak langsung menanggung seluruh biaya, karena gaji dosen dan sarana pendidikan dominan bersumber dari pemerintah. Sedangkan uang pemerintah sebagian besar dan masyarakat melalui pembebasan wajib pajak. Pajak yang dibayar oleh masyarakat dipandang sebagai biaya tidak langsung. Oleh karena itu, pendidikan (dapat dipandang, sebagai aktivitas yang bersifat pelayanan umum.

Transaktor ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu (1) golongan produsen dan (2) golongan konsumen. Para produsen pendidikan terdiri dari pendidik, pengelola pendidikan, badan/lembaga pemerintah dan swasta,

keluarga yang membantu mendidik anak-anak di rumah. Sedangkan para konsumen (*costumers*) pendidikan dapat terdiri dari keluarga atau orangtua siswa, siswa itu sendiri, lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta, dan masyarakat secara umum. Biaya bagi keluarga ialah uang sekolah dan pajak yang dibayar kepada pemerintah yang sebagian oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pendidikan. Di samping itu, biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan pendapatan yang hilang (*earning forgone*) selama mengikuti pendidikan, yang masih perlu dipertanyakan apakah biaya tersebut harus diperhitungkan (Fattah, 2000).

Nilai modal manusia (*human capital*) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (*labour intensif*), tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (*brain intensif*). Adam Smith (1952), pakar ekonomi klasik mengakui bahwa pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ia mengatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa sangat bergantung pada kemggulan inteligensia dan intelektual.

Tingkat pengeluaran biaya pendidikan merupakan indikator upaya keuangan negara untuk investasi dari sumber daya manusia (*human capital*) dan menunjukkan skala prioritas di antara sektor-sektor dalam pengalokasian keuangan negara. Pada umumnya, pengeluaran belanja pendidikan negara ditunjukkan dengan persentase GNP, baik secara keseluruhan maupun menurut jenjang pendidikan. Pada umumnya, satuan biaya di negara-negara Asia mempunyai kesamaan dengan negara-negara belahan dunia lain, kecuali Afrika. Pada pendidikan dasar, satuan biaya pendidikan diperkirakan 10% dan perkapita GNP hampir sebanding dengan Timur Tengah (12%) dan Amerika Latin (9%). Pada pendidikan menengah satuan biaya di Asia sebesar 15%, sedangkan Timur Tengah rata-rata 28% dan Amerika Latin 26%. Pada pendidikan

Tinggi, di Asia mencapai 149% sebanding dengan Amerika Latin yang memiliki rata-rata sebesar 88% (Pusat Informatika, 1995).

Adanya perbedaan dalam pembiayaan di atas dapat ditelusuri melalui perbedaan dalam pilihan kebijakan yang mempengaruhi organisasi dan sistem manajemen pendidikan terutama dalam penggunaan input per sekolah. Pada pendidikan dasar dan menengah penentuan utama biaya pendidikan adalah gaji guru dan rasio guru, siswa. Di negara-negara Asia, peraturan dan keuangan pendidikan pada umumnya merupakan tugas negara dan pendidikan dan pemerintah merupakan yang terbesar dan tersebar lebih merata.

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi.

KARAKTERISTIK ILMU EKONOMI

Masalah apa sebenarnya yang dianalisis oleh para ahli ekonomi, dari mulai Adam Smith sampai Marx, hingga generasi sekarang? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diamati dari beberapa karakteristik ilmu ekonomi, sebagai berikut.

Pertama, ilmu ekonomi menanyakan barang apa (*what*) yang akan diproduksi, bagaimana (*how*) barang dan jasa itu diproduksi, dan untuk siapa (*for whom*) barang dan jasa itu diproduksi.

Kedua, ilmu ekonomi menganalisis setiap gerakan dan perubahan yang terjadi dalam keseluruhan ekonomi; seperti kecenderungan (*trend*) dalam harga, hasil produksi, pengangguran dan perdagangan di dalam dan di luar negeri. Begitu gejala-gejala tersebut dipahami, maka ilmu ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan kebijakan

kebijakan ekonomi dalam upaya keterbukaan perekonomian suatu bangsa.

Ketiga, ilmu ekonomi mempelajari perdagangan di antara berbagai negara. Ilmu ini membantu menjelaskan mengapa negara-negara mengekspor komoditi tertentu dan mengimpor yang lain. Ilmu ini juga menganalisis pengaruh pembatasan terhadap perdagangan internasional.

Keempat, ilmu ekonomi merupakan ilmu mengenai pilihan, yaitu bagaimana orang memilih dalam menggunakan berbagai sumber daya yang relatif terbatas atau langka (*scarcity*), seperti tenaga kerja, mesin dan peralatan, uang untuk memproduksi atau menghasiikan berbagai komoditas (makanan, pakaian, perumahan dan penyalurannya (distribusi) kepada berbagai kelompok masyarakat yang memakai atau mengkonsumsinya.

Kelima, ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang uang, perbankan, modal, dan kekayaan.

Keenam, ilmu ekonomi merupakan suatu disiplin yang berkenaan dengan efisiensi, pengalokasian sumber-sumber yang langka (*scarcity*) untuk mencapai tingkat kepuasan yang setinggi-tingginya (Jones, 1985)

Ketujuh, ilmu ekonomi dapat dipandang sebagai studi tentang produksi dan distribusi semua sumber-sumber yang langka, baik dalam bentuk barang yang kongkret (*tangible*) maupun jasa atau barang yang sifatnya abstrak (*intangible*) dalam memenuhi kebutuhan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat (Samuelson, 1995)

Menurut Samuelson (1995) ilmu ekonomi dalam melakukan kedua peran di atas dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu aspek normatif (nilai) dan aspek positif (fakta). Berdasarkan aspek positif, ilmu ekonomi menggambarkan fakta dan perilaku dalam perekonomian, misalnya, apa penyebab kemiskinan? Bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara? Pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan fakta. Sedangkan aspek normatif, ilmu ekonomi melibatkan etika dan pertimbangan

an nilai. Misalnya, apakah pemerintah harus membagikan uang kepada orang miskin? Apakah sebabnya gaji pegawai dinaikkan? Seberapa besar sebaiknya tingkat inflasi? Permasalahan itu dapat diperdebatkan, tetapi mungkin tidak pernah dapat diselesaikan oleh pertimbangan ilmu dan fakta. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan jawaban atau keputusan politik dan bukan oleh ilmu ekonomi; dengan demikian, para pembuat keputusan politik (kebijakan) memerlukan bantuan ilmu ekonomi yang dapat memberikan masukan yang relevan dalam pembuatan kebijakan. Tentu saja para pemimpin dan pengelola negara tidak perlu menjadi ahli dalam ilmu ekonomi namun pembuat kebijakan, khusus menjadi 'konsumen' atas rekomendasi atau pertimbangan-pertimbangan nilai yang berlaku dalam ilmu ekonomi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Permasalahan yang dihadapi oleh suatu lembaga, baik yang bersifat ekonomi maupun lembaga sosial pada dasarnya dihadapakan pada tiga masalah pokok:

1. Komoditas apa yang harus dihasilkan dan berapa banyak, kapan harus diproduksi, apakah sekarang atau sekian tahun yang akan datang?
2. Bagaimana komoditas itu harus diproduksi?
Dengan perkataan lain, siapa yang melakukan produksi, dengan cara bagaimana?
3. Untuk siapa komoditas itu dihasilkan?
Siapa yang akan memanfaatkannya dan bagaimana mendistribusikannya?

Ketiga pertanyaan di atas sangat mendasar dan akan dihadapai oleh sernua corak organisasi, tetapi dengan cara dan sistem yang berbeda.

KARAKTERSITIK ILMU PENDIDIKAN

Menurut ahli pendidikan yang terkenal dengan bukunya *Beknopte Theoretische Pa Padagogik*, bernama M.J. Langefeld, seorang penganut aliran fenomenologi dari Belanda, ilmu pendidikan dipandang sebagai ilmu teoritis dan ilmu

praktis mempelajari proses pembentukan kepribadian manusia yang dirancang secara sistematis dalam proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Ilmu pendidikan mempelajari proses pembentukan kepribadian manusia dengan kegiatan belajar yang dirancang secara sadar dan sistematis dalam interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Menurut Natawijaya (1995), kepribadian adalah kondisi dinamis yang merupakan keterpaduan antara pola pikir, pola sikap, dan pola tindak individu. Pembentukan kepribadian mencakup proses transfer dan transformasi pengetahuan, sikap dan perlakuan mengenai aspek logika, etika dan estetika yang masing-masing terdiri dan unsur kognitif afektif dan psikomotorik. Dalam mengkaji objek tersebut, ilmu pendidikan menyusun batang tubuh pengetahuan teoritis berdasarkan epistemologi keilmuan secara logis, analitis, sistematis dan teruji dengan mengembangkan postulat, asumsi, prinsip dalam konsep pendidikan dengan bantuan teori keilmuan di luar bidang pendidikan.

Dalam mempelajari interaksi antara pendidik dengan peserta didik dipengaruhi oleh unsur psikologis, sosial, dan budaya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Tekanan tujuan pendidikan setelah pembentukan kepribadian yang mandiri.

Dalam kamus *Websters New World Dictionary* (1962), pendidikan dirumuskan sebagai proses pengembangan dan latihan yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan kepribadian (*character*) terutama yang dilakukan dalam suatu bentuk formula (persekolahan) kegiatan pendidikan mencakup proses dalam menghasilkan (*production*) dan transfer (*distribution*) ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh individu atau organisasi belajar (*learning organization*). Organisasi belajar dimaksud dapat tercapai dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Bertolak dan landasan filosofis, psikologis, dan sosial budaya dan nilai-nilai yang menjadi acuan, ilmu pendidikan yang membentuk batang tubuh ilmu bergantung pada komponen-komponen sebagai berikut:

a. Kurikulum

Kurikulum merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan Interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit/tersembunyi. Teori-teori yang dikembangkan dalam komponen ini meliputi, antara lain, teori tentang tujuan pendidikan, organisasi kurikulum, isi kurikulum, dan modul-modul pengembangan kurikulum.

b. Belajar

Belajar merupakan komponen Ilmu pendidikan yang berkenaan dengan proses pelaksanaan interaksi ditinjau dari sudut peserta didik. Teori-teori yang dikembangkan dalam komponen ini meliputi, antara lain, teori tentang karakteristik peserta didik, jenis-jenis belajar cara-cara belajar hierarki, jenis-jenis, dan kondisi-kondisi belajar.

c. Mendidik dan Mengajar

Mendidik dan mengajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan interaksi ditinjau dan sudut pendidik. Teori-teori yang dikembangkan dalam komponen ini meliputi, antara lain, teori tentang karakteristik pendidik, karakteristik perbuatan pendidikan dan mengajar, metode dan teknik mendidik dan mengajar dan sistem pengolahan kelas.

d. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan berkenaan dengan situasi dimana interaksi belajar-mengajar berlangsung. Teori yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan adalah perencanaan pendidikan, manajemen pendidikan bimbingan konseling, kebijakan pendidikan, dan ekonomi pendidikan.

e. Tujuan Pendidikan

Evaluasi berkenaan dengan prinsip, mental, teknik, dan prosedur dengan cara-cara bagaimana mengenai pencapaian-

an tujuan pendidikan. Sejauh mana kualitas program dan proses pendidikan yang bermutu telah tercapai. Teori-teori yang dikembangkan dalam komponen ini mencakup teori tentang model-model penilaian, metode dan teknik, serta instrumen penilaian.

KONSEP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PSDM)

Inti permasalahan dalam pengembangan SDM berada pada peningkatan kualitas kerja yang mampu menjadi pelaku-pelaku dalam berbagai bidang kehidupan. Tenaga kerja itu sendiri pada dasarnya ialah sumber daya manusia yang berdimensi banyak, baik manusia dipandang secara fisik, intelektual, maupun moral. Karena ragamnya dimensi SDM tersebut, maka pengembangan SDM bisa cukup dibekukan oleh salah satu sektor semata-mata. Namun demikian, di antara sektor-sektor dalam pembangunan, tanggung jawab terbesar dalam lingkaran kualitas SDM berada pada Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebagai penanggung jawab Sistem Pendidikan Nasional, baik pendidikan pengelolaan atau pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah terdiri dari berbagai bentuk, di antaranya pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan di lingkungan industri.

Sumber daya manusia terdiri dari dimensi kuantitatif dan dimensi kualitatif tenaga kerja. prestasi tenaga kerja yang memasuki dunia kerja dalam jumlah waktu belajar adalah dimensi kualitatif dari SDM, sedangkan dimensi kuantitatif mencakup berbagai potensi yang terkandung pada setiap manusia, antara lain pikiran (*ide*), pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memberikan pengaruh terhadap kapasitas kemampuan manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang produktif. Jika pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas tersebut ditingkatkan, maka nilai produktivitas dari SDM akan menghasilkan nilai balik (*rate of return*) yang positif.

Pada dasarnya teori *human capital*, yaitu suatu aliran pengeluaran yang

menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, material yang menentukan pertumbuhan produktivitas melalui investasi dirinya sendiri. Seseorang dapat memperluas alternatif untuk memilih profesi atau pekerjaan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. Human Capital ini dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk investasi SDM di antaranya pendidikan formal, pendidikan informal, pengalaman kerja, kesehatan, dan gizi serta transmigrasi.

Cara berpikir yang tertuang dalam teori SDM (Human Capital) ini sebenarnya mirip dengan “*technological functionalism*”. Teori ini menekankan pada fungsi teknologis dan pendidikan dan penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Teori ini menerangkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan di dalam perkembangan suatu masyarakat. Menurut teori SDM tenaga kerja dianggap sebagai kapital yang tercermin di dalam pengetahuan, gagasan (ide), kreativitas, dan keterampilan dan produktivitas kerja. Jika tenaga kerja dipandang sebagai pemegang kapital, mereka dapat menginvestasikan dirinya untuk kepentingan dirinya bukan dimanfaatkan bagi keuntungan seseorang atau kelompok (majikan, tuan tanah, pemilik modal). Jika eksploitasi ini terjadi, tenaga kerja hanya memiliki fungsi sebagai alat produksi, maupun hasil produksi. Dengan demikian, keuntungan potensial mereka telah dipindahkan ke tangan para pemilik modal.

Di dalam suatu sistem produksi, peningkatan produktivitas dapat dilakukan jika faktor-faktor produksi lainnya dibedakan oleh tenaga kerja. Dengan konsep ini, SDM tidak semata-mata dianggap sebagai faktor produksi yang konvensional, tetapi penggerak sistem produksi secara menyeluruh. Sejalan dengan konsep ini, maka strategi pengembangan SDM harus

berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pembatasan dan perluasan pendidikan harus diciptakan bersama; dengan ini, dilakukan upaya peningkatan relevansi pendidikan secara lebih merata dan meluas dalam berbagai jenis, panjang, dan jalur pendidikan.
2. Pengembangan dan pendayagunaan IPTEK yang memungkinkan untuk menjadi sumber penggerak bagi perluasan motivasi lapangan kerja.
3. Reformasi di bidang pendidikan di negara yang sedang berkembang, dimana kondisi ekonomi sudah maju dengan berbasis perindustrian, maka strategi pengembangan SDM diarahkan untuk teoretis pendidikan fungsi dan pengembangan RISTEK untuk mendorong terciptanya IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan industri.
4. Di negara yang sudah maju perlu dilakukan inovasi di tiap bidang sehingga strategi pengembangan SDM lebih terfokus pada peningkatan mutu pendidikan tinggi.
5. Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ketenagakerjaan secara lengkap yang mencakup:
 - a. kebutuhan tenaga kerja,
 - b. sistem pendidikan formal dan nonformal,
 - c. struktur tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja terdidik yang berkualitas.
6. Inventarisasi kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek berdasarkan pada estimasi kebutuhan tenaga kerja dalam perspektif jangka panjang.

KONSEP DASAR EKONOMI PENDIDIKAN

Ekonomi pendidikan merupakan bagian terpenting dari ilmu ekonomi yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari ilmu ekonomi sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi pendidikan berikut ini diuraikan definisi yang dikemukakan oleh Cohn (1979) sebagai

berikut: “Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (*equal*) dan adil (*equality*) di antara berbagai kelompok masyarakat”

Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh prespektif investasi sumber daya manusia (*human capital*). Konsep investasi SDM ini menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori *human capital* menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital (*capital holder*) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang kapital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Investasi sebagai suatu konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa di kemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang (Cohn, 1979, Psacharopoulos, 1988). Investasi dalam Bidang SDM memiliki prinsip yang tidak berbeda dengan konsep investasi manusia juga bisa dianggap sebagai suatu entitas yang nilainya bisa berkembang di kemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap.

Perilaku, wawasan, keahlian, dan keterampilan manusia dengan nilai-nilai tersebut merupakan subjek dan konsepsi SDM atau Human Capital. Pengembangan SDM tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan pada berbagai jenjang dan jalur. SDM ini bernilai jika kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan

hidup dan sekiur pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat (Harbison dan Meyers, 1964).

Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga jumlahnya. Pertimbangan ekonomis didasarkan pada tujuan masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, skala prioritas adalah pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang biasanya merupakan prioritas tertinggi, khususnya di Negara yang sedang berkembang. Bank Dunia sejak tahun 1960-an menentukan empat criteria untuk investasi SDM dalam memberikan bantuannya terhadap Negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam pengembangan SDM, yaitu (1) kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi, (2) perluasan pendidikan dasar dan ini dinilai memiliki tingkat balik (*rate of return*) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya, (3) pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan missal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan, serta (4) keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lainnya, baik secara geografis, sosial maupun secara ekonomi (Djojonegoro dan Suryadi, 1995)

Perhatian terhadap criteria pemerataan kesempatan pendidikan telah berkembang teramat pesat sejak Bank Dunia terlibat di dalam investasi pendidikan di negara-negara berkembang. Di Indonesia sejak tahun 1978, dilakukan penghapusan SPP untuk SD untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dasar. Namun demikian, Investasi dalam pemerataan pendidikan sebagai investasi SDM, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji dan diperhitungkan sebagai criteria keberhasilan, yaitu (1) nilai baik ekonomis langsung dan suatu investasi, yaitu perimbangan antara biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan

keuntungan masa depan yang diharapkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, (2) nilai balik ekonomis tidak langsung, yaitu keuntungan eksternal yang mempengaruhi pendapatan anggota masyarakat lain, (3) keuntungan fiskal, yaitu peningkatan penerimaan negara dan sektor pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik, (4) pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih, (5) permintaan masyarakat akan pendidikan, (6) efisiensi internal dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu hubungan antara input dan output yang diukur dengan indikator-indikator pemborosan, pengulangan, putus sekolah, dan efektivitas biaya, (7) terciptanya distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk usia sekolah, (8) dampak positif dan pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, (9) kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor lain, di antaranya kesehatan, industri, pertanian. Investasi SDM diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang telah membuktikan pentingnya pendidikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat setelah memperhitungkan efek transaksi antara pendidikan dengan bentuk investasi fisik lainnya (Psacharopoulos, 1984). Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik yang langsung maupun tidak langsung menghubungkan indikator pendidikan dan indikator ekonomi, seperti model *fungsi produksi, analisis cost-benefit, cost-effectiveness*.

KESIMPULAN

Nilai ekonomi pendidikan dapat dilihat dan sumbangan atas manfaat terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat, pendidikan bermanfaat

untuk memperkaya kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi.

Uang yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, di masa yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan (*benefit*) atau manfaat, baik dalam bentuk uang (*financial*) maupun nonfinansial. Dalam bentuk uang yang diperoleh sebagai balas jasa atas produktivitas tenaga kerja dan dalam bentuk nonfinansial nilai-nilai, seperti meningkatkan kesehatan, keamanan atau ketertiban masyarakat, baik dari aspek individu, sosial, maupun ekonomi.

Konsep ekonomi dan pembiayaan pendidikan, khususnya keterkaitan pendidikan dengan ekonomi secara makro yang mengandung implikasi terhadap kebijakan dalam pembiayaan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai alat vital dalam memajukan dan membuat suatu bangsa menjadi modern, mempunyai ketangguhan dalam menghadapi permasalahan kehidupannya. Selain itu pendidikan pun merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas hidup atau meningkatkan standar hidup suatu bangsa. Peningkatan standar hidup suatu bangsa juga merupakan tujuan utama ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam mencapai kepuasan hidup.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. 1995. *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan*. Depdikbud, Jakarta
- Bank Dunia. 1993. *The East Asia Miracle*. University Press, Oxford.
- Djojonegoro, W dan Suryadi, A. 1995. *Peningkatan Kualitas SW Untuk Pembangunan*, Depdikbud, Jakarta.
- Cohn, E. 1979. *The Economics of Education: An Introduction*.

Ballinger Publishing Company,
Massachussets.

Fattah, N. 2000. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Harbbison F. dan Meyrs C. 1964. *Education, Main Power and Economic Growth*. McGraw-Hill Book Company New York.

Jones, T.H. 1985. *School Finance: Technique and Social Policy*. Collier MacMillan Publishers, London.

Morphet, E.C. 1983. *The Economics & Financing of Education*. Prentice

Hall Inc. Engetwood Cliffs, New Jersey.

Psacharopoulos. 1988. *Return to Education; a Further International Update and Implication*. Journal of Human Resources.

Sallis, E. 1993. *Total Quality Management in Education*. Kogan Page Limited, London.

*) Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawsi DPK pada Fakultas Sastra Universitas Islam Makassar